

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI SDN 173416 SIPITUHUTA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Hirim sarimauli Lumban Gaol

Abstrak. Pembiayaan pendidikan itu proses pengeluaran berbentuk uang ataupun pengorbanan dalam rangka melaksanakan seluruh aktivitas-aktivitas program pelaksanaan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembiayaan pendidikan di SD Negeri 173416 Sipituhuta Tahun Ajaran 2017/2018. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Informannya yaitu Ibu Erna Pasaribu selaku Operator sekolah SDN 173416 Sipituhuta. Teknik pengumpulan data dengan mewawancarai narasumber secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Pendidikan berasal dari BOS.

Kata kunci: *Pembiayaan Pendidikan, Sekolah Dasar*

Pendahuluan

Di dalam tujuan pendidikan nasional menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sedangkan UU no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk

mempeoleh pendidikan yang bermutu", dan pasal 11 ayat (1) menyatakan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi".

Implementasi Kebijakan Otonomi daerah yang didasarkan pada UU No. 22 tahun 1999 jo UU No. 32 Tahun 2004, yaitu memutuskan suatu keputusan dan atau kebijakan secara mandiri dimana kewenangan yang dulu berada di pusat sekarang telah diserahkan kepada daerah dalam hal ini propinsi dan kabupaten/kota. Pemberian otonomi ini dimaksudkan untuk lebih memandirikan daerah dan memberdayakan masyarakat sehingga lebih leluasa dalam mengatur dan melaksanakan

kewenangannya atas prakarsa sendiri. Pemberian otonomi yang luas dan bertanggung jawab dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, berkeadilan, dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah, dengan titik sentral otonomi pada tingkat yang paling dekat dengan rakyat, yaitu kabupaten dan kota. Hal yang esensial dari otonomi daerah adalah semakin besarnya tanggung jawab daerah untuk mengurus tuntas segala permasalahan yang tercakup di dalam pembangunan masyarakat di daerahnya, termasuk bidang pendidikan (Jalal dan Supriadi, 2001: xxxii). Dengan memberikan peluang yang besar kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan dasar dan menengah kepada masyarakat.

Kewenangan besar yang dimiliki oleh daerah dengan Undang-undang otonomi daerah tentu saja hanya akan bermanfaat apabila diikuti dengan kapasitas pemerintah Kabupaten/Kota untuk membuat kebijakan-kebijakan yang akurat yang diarahkan untuk meningkatkan input dan proses pembelajaran. Upaya untuk membuat kebijakan yang akurat dalam bidang pendidikan, salah satunya akan sangat tergantung kepada tersedianya

informasi yang valid tentang berbagai persoalan pendidikan yang dihadapi oleh Kabupaten/Kota. Dengan informasi yang valid tersebut para *policy maker* akan dapat merumuskan apa persoalan pokok yang harus dipecahkan dari aspek input dan proses pembelajaran, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Setelah substansi persoalan dapat diketahui dan dirumuskan dengan jelas selanjutnya para *policy maker* di daerah akan dapat membuat kebijakan-kebijakan yang tepat guna untuk memecahkan masalah tersebut.

Biaya Pendidikan menurut *Suhardan (2012: 22)* adalah total biaya yang dikeluarkan baik oleh individu peserta didik, keluarga yang menyekolahkan anak, warga masyarakat perorangan, kelompok masyarakat maupun yang dikeluarkan pemerintah untuk kelancaran pendidikan. Sedangkan menurut *Matin (2014:4)* menyatakan bahwa, pembiayaan pendidikan pada dasarnya merupakan suatu proses mengalokasikan sumber -sumber pada kegiatan-kegiatan atau program-program pelaksanaan operasional pendidikan atau dalam proses belajar mengajar dikelas.

Mulyono (2010:155) menyatakan bahwa biaya pendidikan bukan hanya berbentuk uang, melainkan juga dalam

bentuk biaya kesempatan (opportunity cost) yang sering disebut income forgone, yaitu potensi pendapatan bagi seorang siswa selama ia mengikuti pelajaran atau menyelesaikan studi. Hal senada diungkapkan oleh *E. Mulyasa (2011:168)* yang menyatakan bahwa dana pendidikan tidak selalu identik dengan uang (red cost), tetapi segala sesuatu pengorbanan yang diberikan untuk setiap aktivitas dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan itu proses pengeluaran berbentuk uang ataupun pengorbanan dalam rangka melaksanakan seluruh aktivitas- aktivitas program pelaksanaan pendidikan. *Wijaya (2012:119)* mengemukakan bahwa “biaya pendidikan merupakan harga dasar atau harga minimum jasa pendidikan yang dikenakan pada produk jasa pendidikan tertentu.

Menurut *Mulyasa (2004: 48)*, biaya rutin adalah biaya yang langsung dikeluarkan dari tahun ke tahun, seperti gaji pegawai (guru dan non-guru), serta

Pada tingkat propinsi dan kabupaten/kota, anggaran untuk sector pendidikan sebagian besar berasal dari dana

biaya operasional, biaya pemeliharaan gedung, fasilitas dan alat-alat pengajaran (barang-barang habis pakai). Sementara biaya pembangunan misalnya biaya pembelian atau pengembangan tanah, pembangunan gedung, perbaikan atau rehab gedung, penambahan furniture, serta biaya atau pengeluaran lain untuk barang-barang yang tidak habis pakai.

Fattah (2000) menambahkan biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirectcost). Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa seperti pembelian alat-alat pembelajaran, penyediaan sarana pembelajaran, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan pemerintah, orang tua maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang yang dikorbankan oleh siswa selama belajar, contohnya: uang jajan siswa, pembelian peralatan sekolah (pulpen, tas, buku tulis, dan lain-lain.

yang diturunkan dari pemerintah pusat ditambah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dituangkan dalam Rencana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Pada era otonomi daerah sekarang, sebagian besar dana dalam RAPBD propinsi dan kabupaten/kota diperoleh dari pusat yang disalurkan dalam bentuk paket yang disebut Dana Alokasi Umum (DAU) dan untuk sebagian ditambah lagi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pada tingkat sekolah (satuan pendidikan), biaya pendidikan diperoleh dari subsidi pemerintah pusat, pemerintah daerah, iuran siswa, dan sumbangan masyarakat, sejauh tercatat dalam anggaran

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yang mana dalam mengkaji masalah yang diangkat penulis berusaha mengumpulkan informasi aktual dari gejala yang ada. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di SDN 173416 Sipituhuta yang letaknya di Jalan Sipituhuta kecamatan Pollung, kab.Humbang Hasundutan. Adapun Subjek penelitian adalah Erna Pasribu selaku Operator sekolah SDN 173416 Sipituhuta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. HASIL PENELITIAN

pendapatan dan belanja sekolah, sebagian besar biaya pendidikan di tingkat sekolah berasal dari pemerintah pusat, sedangkan pada sekolah Negeri berasal dari pemerintah pusat, sedangkan pada sekolah swasta berasal dari para siswa atau yayasan. Besar kecilnya biaya pendidikan, terutama pada tingkat satuan pendidikan, berhubungan dengan berbagai indikator mutu pendidikan seperti angka partisipasi angka putus sekolah, dan tinggal kelas, dan prestasi belajar siswa (*Ditjen PUOD, 1993; Trisnawati, dkk, 2001; Supriadi, 2002*).

Dalam Penelitian ini Teknik pengumpulan data dengan mewawancarai narasumber secara langsung dan Instrumen survey pembiayaan pendidikan, berupa isian yang diisi oleh pihak sekolah (kepala sekolah atau yang mewakili).

Teknik Analisis Data Data kualitatif dianalisis dengan teknik kualitatif dimana reduksi dan klasifikasi dilakukan untuk memperoleh simpulan yang bermakna, baik verifikasi kondisi empirisnya, maupun untuk menghasilkan rekomendasi yang tepat, relevan, dan mungkin di implementasikan.

SDN 173416 Sipituhuta merupakan salah satu sekolah dasar di kabupaten Humbang

Hasundutan dengan luas Tanah 11,000 m². SDN 173416 Sipituhuta terletak di Jalan Sipituhuta kecamatan Pollung, kab.Humbang Hasundutan. Hasil penelitian tentang pembiayaan pendidikan di SDN 173416 Sipituhuta, baik biaya Operasional maupun biaya investasi. Berdasarkan Hasil pengumpulan data yang menggunakan metode wawancara langsung oleh peneliti kepada Ibu Erna Pasaribu A.md selaku operator sekolah SDN 173416 Sipituhuta yang mengetahui aspek pembiayaan pendidikan di sekolah tersebut. Biaya Operasional yang terdapat di SDN 173416 Sipituhuta meliputi biaya: (a) Kesejahteraan Tenaga Pendidik Dan Kependidikan, (b) Peningkatan Profesi/Diklat, (c) Penyelenggaraan KBM, (d)penilaian, (e)pemeliharaan dan pergantian ,(e) daya dan jasa (f)Kesiswaan, (g)Supervisi. Dan biaya investasi di SDN 173416 Sipituhuta meliputi: (a) Sarana Prasarana, (b)Tenaga.

Sebagai sekolah negeri, SDN 173416 Sipituhuta tidak diperkenankan melakukan pungutan apapun terhadap orang tua siswa terkait dengan pemenuhan kebutuhan operasional sekolah. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Dasar. Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Dasar menyatakan bahwa satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.

Berdasarkan pembiayaan Pendidikan biaya operasional SDN 173416 Sipituhuta mengalokasikan dana untuk Kesejahteraan Tenaga Pendidik Dan Kependidikan sebesar Rp.800,000; Peningkatan Profesi/Diklat sebesar Rp.6,000,000; Penyelenggaraan KBM sebesar Rp.44,000,000; Penilaian sebesar Rp.3,000,000; Pemeliharaan dan penggantian sebesar Rp.34,500,000; Daya dan Jasa sebesar RP.450,000; dan Kesiswaan sebesar Rp.7,400,000 per/bulannya.

Sekolah mengalokasikan dana terbesar pada Penyelenggaraan KBM sebesar Rp.44,000,000; Kegiatan belajar-mengajar merupakan inti dan pelaksanaan kurikulum Baik-buruknya mutu pendidikan atau mutu lulusan dipengaruhi oleh mutu

kegiatan belajar-mengajar. Bila mutu lulusannya bagus dapat diproduksi bagus mutu kegiatan belajar-mengajarnya juga bagus: atau sebaliknya, bila mutu kegiatan belajar-mengajarnya bagus, maka mutu

Dari hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa Biaya operasional di SDN 173416 SIPITUHUTA berjumlah RP. 83,300,000. Biaya investasi pembiayaan pendidikan sangat tinggi dengan jumlah RP.1,590,000,000. Biaya

PEMBAHASAN

Sekolah sebagai salah satu tempat penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar secara formal tentunya ingin menyelenggarakan pendidikan yang baik dan berkualitas, begitu pula dengan SDN 173416 SIPITUHUTA.

Dana pendidikan merupakan sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Dana pendidikan dibutuhkan untuk membiayai operasional sekolah mulai dari Kesejahteraan Tenaga Pendidik

Biaya operasional di SDN 173416 SIPITUHUTA dengan jumlah RP. 83,300,000. Apabila dihitung biaya satuan untuk setiap anak mencapai Rp 276,000 per anak per tahun. Dan biaya personal yang

lulusannya juga akan bagus. Pembiayaan pendidikan biaya investasi di SDN 173416 Sipituhuta meliputi: (a) Sarana Prasarana sebesar Rp. 1,590,000,000;

terbesar BIS dialokasikan untuk biaya sarana prasarana berupa Biaya untuk pembangunan ruang kelas baru, Biaya untuk pembangunan ruang Perpustakaan, Biaya untuk pembangunan Laboratorium Bahasa.

Dan Kependidikan, (b) Peningkatan Profesi/Diklat, (c) Penyelenggaraan KBM, (d)penilaian, (e)pemeliharaan dan pergantian ,(e)daya dan jasa (f)Kesiswaan, (g)Supervisi maupun kegiatan pengelolaan pendidikan sampai memperbaiki atau menambah fasilitas sekolah. Besarnya dana yang diterima setiap sekolah bergantung pada sumber dana. Sumber dana pendidikan merupakan pihak-pihak yang memberikan bantuan subsidi dan sumbangan kepada lembaga pendidikan. BOS merupakan sumber dana utama ditambah dengan BOS dari pemerintah daerah

dikeluarkan oleh orang tua untuk pendidikan anaknya dikategorikan rendah. Rendahnya biaya yang dikeluarkan orangtua karena SDN 17416 Sipituhuta tidak diperkenankan melakukan pungutan

apapun terhadap orang tua siswa berdasarkan perturan Pemerintah.

Biaya investasi sekolah (BIS) merupakan biaya yang dikeluarkan untuk komponen sarana prasarana, pengadaan tenaga dan komponen lain yang dilakukan dalam kurun waktu lebih dari satu tahun. Biaya investasi terdiri dari biaya sarana dan prasarana, dan tenaga. Biaya sarana dan prasarana terdiri dari biaya untuk lahan, bangunan, buku, dan alat-alat pembelajaran.

Biaya investasi pembiayaan pendidikan sangat tinggi dengan jumlah

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa biaya personal yang dikeluarkan orangtua SDN 173416 cukup rendah per/tahunnya, dan Biaya investasi terdiri dari biaya sarana dan prasarana, dan tenaga. Biaya sarana dan prasarana terdiri dari biaya untuk lahan, bangunan, buku,

Mulyasa E. 2004. Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung : Remaja Rosdakarya

Supriadi, Dedi, 2004, *satuan pendidikan dasar dan menengah: rujukan bagi penetapan kebijakan pembiayaan pendidikan pada era manajemen*

RP.1,590,000,000. Biaya terbesar BIS dialokasikan untuk biaya sarana prasarana berupa Biaya untuk pembangunan ruang kelas baru, Biaya untuk pembangunan ruang Perpustakaan, Biaya untuk pembangunan Laboratorium Bahasa. Biaya investasi merupakan biaya yang dikeluarkan dalam kurun waktu lebih dari satu tahun. Artinya biaya ini dikeluarkan dalam kurun waktu lebih dari satu tahun, mungkin dua tahun, lima tahun, atau bahkan sepuluh tahun.

KESIMPULAN

dan alat-alat pembelajaran. Pemenuhan biaya operasional dan investasi sekolah SDN 173416 saat ini ditanggung oleh pemerintah pusat melalui program bos pusat, ditanggung oleh pemerintah propinsi melalui program bos propinsi, dan kab./kota melalui bos pendamping.

DAFTAR PUSTAKA

dan ekonomi berbasis sekolah.

Bandung: Rosdakarya

Permana, Johar, dkk, Model Peta Pembiayaan Pendidikan Kab./Kota Dalam Konteks Otonomi Daerah. *Artikel Penelitian*. November 2009